



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 319/057/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT WAJIB LAPOR
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan transparansi dalam pengelolaan kekayaan penyelenggara negara;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap Penyelenggara Negara dan Pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Pejabat Wajib Lap or Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.



- KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum KESATU wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara secara berkala, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- KETIGA : Apabila terdapat Pejabat yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara tanpa alasan yang sah, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 319/057/

TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT WAJIB LAPOR HARTA

KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TAHUN 2025

PEJABAT WAJIB LAPOR LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA

No.	NIK	Nama	Jabatan	Sub Unit Kerja
1.	7103141602890002	MICHAEL THUNGARI, S.E.,M.M	BUPATI	BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
2.	7103111701890001	TENDRIS BULAHARI	WAKIL BUPATI	WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
3.	7103170505660002	MELANCHTON HARRY WOLFF, ST. ME	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
4.	7103171701680301	JOHANIS EMIL HENGKENGUSA PILAT, S.SOS, MM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
5.	7103242901670001	Ir. GREGORIUS DOMINIUS LONDO, ST, SE, M.SC	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
6.	7103177001660301	VEBE A. K. BAWOLE, S.Sos,ME	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIAT DAERAH
7.	7103245708680003	IR RIPUTRI TAMAKA, ME	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD
8.	7103170212690001	Drs DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME	KEPALA DINAS	DINAS SOSIAL DAERAH

9.	7109117056600001	FRANS GERSON PORAWOUW, S.IP	KEPALA DINAS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
10.	7103176904700001	ENGELIN SASIANG, ST.MM	KEPALA DINAS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
11.	7104071203680001	ERNIST HABEL UNAS, S.PI, M.SI	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
12.	7172066510760001	FEMMY ELSYE OKTOVIANE MONTANG, S.E., Ak, M.Acc	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAERAH
13.	7103080401770002	dr HANDRY PASANDARAN, ME	KEPALA DINAS	DINAS KESEHATAN DAERAH
14.	7103240411750001	FRANKY NANTINGKASE H, S.PI	KEPALA DINAS	DINAS PERTANIAN DAERAH
15.	7103171205670001	IR SONNY KAPAL, MM	KEPALA DINAS	DINAS PARIWISATA DAERAH
16.	7103171308710001	Drs DANNY ALPIUS MATULENDE MANDAK, ME	KEPALA DINAS	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH
17.	7103240301660001	IR. REINTJE BERNAD TAMBOTO	KEPALA DINAS	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
18.	7103170502720301	FERDINAND MANUMPIL,S.S os	KEPALA BADAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

19.	7103240311710001	THREENOV TOUFANUS PONTO, SH	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH
20.	7103172908690001	GODFRIET FERDINAN PELLA, SP.ME	KEPALA BADAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
22.	7103172406660301	VICTOR HELMUD T. NUSALAWO, MM	KEPALA DINAS	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
23.	7103242801700001	Drs DEKKY SURUDANI	KEPALA DINAS	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH
24.	7103240104710001	ALFRIED NELSON LIMPONG, SPI, MSI	KEPALA DINAS	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
25.	7103172608680001	dr JOPY FERDINAND THUNGARI, M.KES	KEPALA DINAS	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
26.	7103131605720001	WANDU CAPRI CARNUS LABESI, S.SOS	KEPALA BADAN	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH
27.	7104041110730002	RONALD OCTOVIANTO ADE CHARMA CAHAYA IZAAK, AP,MSi	KEPALA BADAN	BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
28.	7103242904810001	dr APRIKONUS DAUD LORIS, SP.PD	DIREKTUR	RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA
29.	7171080506760021	JEMMI KASEGELE, A.MD.AK	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH
30.	7103175411790002	HERLINA SARIDEWI TENDAUNUSA, SP	PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH

31.	7103170212760001	SHERMAN WILLIAMS ABAST, SE	KEPALA BAGIAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
32.	7103171908710001	TEGUH PRAHARA SALAINTI, S.IP, ME.	DIREKTUR	BUMD
33.	7103245206890001	CHARISMA WATY SENTINUWO,SE	AUDITOR AHLI PERTAMA	INSPEKTORAT DAERAH
34.	7103247010830001	IDEANA JOHANIS, SE	AUDITOR MUDA	INSPEKTORAT DAERAH
35.	7103175907650301	DRA MARTINA ERLISIAWATI PARERA, MM	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH
36.	7109040103760001	MAXSON AMBAT, SE	AUDITOR MUDA	INSPEKTORAT DAERAH
37.	7103160510690003	ABDUL RIFAI MAHDANG, SH	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN	STAF AHLI
38.	7103175104870301	HELLEN MANOS, S.M	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH
39.	7103231001800001	JODIE WUNGKAR, S.T.	KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN DAN KETATAUSAHAAN/ PANITIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
40.	7103242904810001	ARYANTO REO MAALUAS,SE	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH
41.	7103080103730001	MAKLON MENYER PARAENG, S.H.	KEPALA SUB BAGIAN INFORMASI DAN PENGADUAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
42.	7109024605830001	RENI YANTI GARING, S.SOS	PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH

43.	7103171906800001	JUNS RONALDY PARERA, ST	AUDITOR MUDA	INSPEKTORAT DAERAH
44.	7103245711820001	SEFHLI YOAN RUMOPA MANSOARA, SE	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH
45.	7103085706860002	JEANE BOHAM, ST.M.AP	PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN	INSPEKTORAT DAERAH
46.	7103240409870002	SOFYO MAKAUSI, SAP	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN	AUDITOR KEPEGAWAIAN INSPEKTORAT DAERAH
47.	7103246506850001	FITRIA SULASTRI BENTELU, SE	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
48.	7103246502840001	STEFANIE FINENCIA ALCE WUATEN, ST	PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
49.	7171027112840001	STEVANNY AUDIA ABAST, SE	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH
50.	7103236312690001	DIANA ENGELIN PANGANDAHEN G, A.MD.KP	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH
51.	7103125702850001	ANGELA VERONICA SATRIANA, SE	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT DAERAH
52.	7104075202750001	FEBIYANY NELFIE TAMALAWA, S.S	PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
53.	7103242707780002	DONALD ATHUR ROYKE MEDEA, ST	PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENGAWAS PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
54.	7103246102770001	PELMADAYATI MODODAH, SH	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH

A

55.	7103234207670001	Dra VIVA JUNDA MASOA, ME	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN	STAF AHLI
56.	7103171901850001	KENIT D. P. SUTARTO, S.T.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
57.	7103244502790001	YEMMA SWASTI LAMORAHAN, S.T.	KEPALA SUB BAGIAN PELAYANAN DAN KETATA USAHAAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
58.	7101315510830001	YULIASRI BINOL, SP	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
59.	7103245105860004	INGGRIED L. PATARA, S.M	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
60.	7171071409760002	STENLY H. MANDAK, SE, AK	AUDITOR AHLI MUDA	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH
61.	7103247110730001	DIRTJE KROMA, S.A.P.	PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
62.	7171060701810002	YOSIA PUDINAUNG,ST	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH
63.	7103242007840001	BENHARD L. BARAHAMA, S.T.	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT DAERAH
64.	3525151210870005	ROBBY RUBINSTEEN, S.E.	AUDITOR PERTAMA	INSPEKTORAT DAERAH

65.	7103246502840001	STEFANIE F. A. WUATEN, S.T.	PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
66.	7103246102770001	PELMADAYATI MODODAHU, S.H.	PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
67.	7103082307830001	DISYON R. LALA,ST	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)	INSPEKTORAT DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI